



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1228, 2022

KEMEN-KUKM. SKKAAD. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tertib administrasi dalam pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis dan kemudahan akses arsip bagi publik serta perlindungan terhadap keamanan arsip, perlu dilakukan klasifikasi keamanan dan hak akses arsip dinamis di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- b. bahwa Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 214);
 6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1159);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan penciptaan Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
3. Pengamanan Arsip Dinamis adalah program perlindungan terhadap fisik dan informasi Arsip Dinamis berdasarkan klasifikasi keamanan yang ditetapkan sebelumnya.
4. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan Arsip di lingkungannya.
5. Publik adalah warga negara atau badan hukum yang mengajukan permohonan untuk mengakses Arsip Dinamis.
6. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum.
7. Terbatas adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
8. Biasa/Terbuka adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.

9. Pengguna Internal adalah setiap orang atau unit kerja yang menggunakan Arsip dan berasal dari lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
10. Pengguna Eksternal adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan Arsip dan berasal dari luar lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
11. Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis yang selanjutnya disingkat SKKAAD adalah aturan pembatasan hak akses terhadap fisik Arsip dan informasinya sebagai dasar untuk menentukan keterbukaan dan kerahasiaan Arsip dalam rangka melindungi hak dan kewajiban pencipta Arsip dan pengguna dalam pelayanan Arsip.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
13. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini merupakan pedoman bagi seluruh Unit Pengolah dalam pengelolaan Arsip Dinamis untuk menyediakan informasi Kementerian yang dapat diakses baik Pengguna Internal maupun Pengguna Eksternal.

Pasal 3

SKKAAD bertujuan untuk:

- a. melindungi fisik dan informasi Arsip dari kerusakan dan kehilangan sehingga ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, otentisitas, dan reliabilitas Arsip dapat tetap terjaga; dan
- b. melindungi Arsip dari pengaksesan yang tidak sesuai hak akses sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan Arsip oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.

Pasal 4

Ruang lingkup Pengaturan SKKAAD meliputi:

- a. sistem klasifikasi keamanan Arsip Dinamis;
- b. hak akses Arsip Dinamis; dan
- c. pengamanan penyimpanan dan pengamanan penyampaian Arsip Dinamis.

Pasal 5

- (1) Sistem klasifikasi keamanan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. Biasa/Terbuka;
 - b. Terbatas; dan
 - c. Rahasia.
- (2) Penentuan klasifikasi keamanan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan tingkat keseriusan dampak yang timbul dalam hal informasi yang terdapat dalam Arsip Dinamis

disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan kepentingan yang tidak sah.

- (3) Penentuan klasifikasi keamanan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Unit Pengolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pengaturan hak akses Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilaksanakan sesuai dengan sistem klasifikasi keamanan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 7

- (1) Pengguna Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. penentu kebijakan meliputi:
 1. Menteri;
 2. pejabat tinggi madya;
 3. pejabat tinggi pratama;
 4. staf khusus menteri;
 - b. pelaksana kebijakan meliputi:
 1. pejabat administrator;
 2. pejabat pengawas;
 3. pejabat fungsional; dan
 4. pejabat pelaksana.
 - c. pengawas internal.
- (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 berwenang mengakses seluruh Arsip.
- (3) Pejabat tinggi madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, pejabat tinggi pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, dan staf khusus menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4:
 - a. berwenang mengakses Arsip yang terdapat pada Unit Pengolah di bawah kewenangannya;
 - b. diberikan akses atas Arsip yang terdapat pada pimpinan level tertinggi dengan izin pimpinan tingkat tertinggi;
 - c. diberikan akses atas Arsip yang terdapat pada satu level dengan unit di luar unit kerjanya/ di luar kewenangannya setelah mendapatkan izin dari pejabat pada Unit Pengolah yang bersangkutan.
- (4) Pejabat administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3, dan pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4 berwenang mengakses:
 - a. seluruh Arsip yang berada pada tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. Arsip dengan tingkat klasifikasi Biasa/Terbuka; dan
 - c. Arsip yang terdapat pada Unit Pengolah diluar unit kerjanya setelah mendapatkan izin dari pejabat pada Unit Pengolah yang bersangkutan.

- (5) Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berwenang mengakses seluruh Arsip di Kementerian dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Klasifikasi keamanan dan klasifikasi akses Arsip Dinamis Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Pengguna Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. pengawas eksternal;
 - b. aparat penegak hukum; dan
 - c. publik.
- (2) Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang mengakses seluruh Arsip di Kementerian dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang mengakses Arsip di Kementerian yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditanganinya dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum.
- (4) Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat mengakses Arsip di Kementerian yang dikategorikan Biasa/Terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pengamanan penyimpanan dan pengamanan penyampaian Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dikoordinasikan oleh Unit Kearsipan.
- (2) Pelaksanaan Pengamanan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pejabat fungsional arsiparis di Unit Pengolah.
- (3) Dalam hal pada Unit Pengolah belum tersedia pejabat fungsional arsiparis, Pengamanan Arsip Dinamis dilaksanakan oleh pegawai yang ditunjuk sebagai pengelola Arsip oleh Unit Pengolah.

Pasal 11

Pengamanan penyimpanan dan pengamanan penyampaian Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor

Menengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 632), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2022

MENTERI KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TETEN MASDUKI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KOOPERASI DAN USAHA KECIL
 DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 13 TAHUN 2022
 TENTANG
 SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP
 DINAMIS DILINGKUNGAN KEMENTERIAN KOOPERASI
 DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Tabel Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis

NO	KODE KLASIFIKASI FASILITATIF	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
A	HM	HUBUNGAN MASYARAKAT				
1	HM.00	Pemberitaan/Publikasi Dokumentasi/liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa bidang masing-masing, dalam berbagai media: Kertas/foto/video/rekaman suara/multi media a. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah b. Eselon I c. Pejabat lain/pegawai Dengar Pendapat/Hearing Dokumen persidangan dan Rapat (Bahan Sidkab, Rapat Terbatas, Rakor Tingkat Badan, RDP DPR/DPD RI, Pidato Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah) a. Bahan Sidang Kabinet b. RDP DPR/DPD RI c. Rakor Tingkat badan termasuk hasil rumusan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro KTI
2	HM.01		Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro KTI

NO KLASIFIKASI	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		dan transkrip Bahan Rapat Terbatas Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah e. Pidato Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah f. Bahan Pidato kenegaraan Presiden bidang Koperasi dan UKM				
3	HM.02	Hubungan Media dan Antar Lembaga a. Hubungan antar lembaga pemerintah b. Hubungan dengan organisasi sosial/LSM c. Hubungan dengan perusahaan d. Hubungan dengan perguruan tinggi/sekolah, termasuk magang pendidikan sistem ganda (PSG)/praktek kerja lapangan (PKL) f. Forum kehumasan (Bakohumas/Perhumas) g. Hubungan dengan media massa: a) Siaran pers/konferensi pers/press b) Kunjungan wartawan/peliputan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro KTI
4	HM.03	Dokumentasi dan Penerbitan Pengumpulan, pengolahan dan penyajian Informasi kelembagaan: a. Kliping koran b. Brosur/leaflet/poster/plakat c. Pengumuman/pemberitahuan d. Penerbitan Majalah, Buletin, Koran dan Jurnal e. Publikasi melalui media cetak maupun elektronik f. Pamflet/sayembara/lomba/festival/pembuatan Spanduk dan Iklan g. Layanan Diorama	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro KTI

NO KLASIFIKASI	KODE HK	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	HK.00	HUKUM Program Legislasi a. Bahan/materi program legislasi nasional dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah b. Program legislasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah c. Rancangan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan d. Rancangan Peraturan Pemerintah, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan e. Rancangan Peraturan/Keputusan/Instruksi Presiden, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan Produk Hukum a. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai dengan ditetapkan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Hukum dan Kerja Sama
2	HK.01 HK.01.00		Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Hukum dan Kerja Sama

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
3	HK.01.01 HK.02	<p>b. Keputusan / Ketetapan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (mulai dari rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum)</p>	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Hukum dan Kerja Sama
		<p>a. Kerjasama Dalam Negeri</p> <p>a) Rancangan/draf sampai dengan rancangan final, telaah/kajian/evaluasi dan pertimbangan hukum, naskah asli yang ditandatangani, risalah pembuatan NK, MoU, kontrak, perjanjian.</p> <p>b) Administrasi penandatanganan NK, MoU, kontrak, PKS.</p> <p>c) MoU/Nota Kesepahaman, Kontrak, Perjanjian Kerjasama (PKS).</p> <p>b. Kerjasama Luar Negeri</p> <p>a) Rancangan/draf sampai dengan rancangan Final telaah/kajian/evaluasi dan pertimbangan hukum naskah asli yang ditandatangani, risalah pembuatan NK, MoU, kontrak, perjanjian.</p> <p>b) MoU/Nota Kesepahaman, Kontrak, Perjanjian Kerjasama (PKS).</p>	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Hukum dan Kerja Sama

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
4	HK.03	Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi a. Bantuan Hukum Kasus Perdata a) Gugatan b) Surat Pemanggilan c) Surat Kuasa d) Putusan Sidang e) Banding f) Tindak lanjut hasil sidang b. Bantuan Hukum Kasus Pidana a) Gugatan b) Surat Pemanggilan c) Surat Kuasa d) Putusan Sidang e) Banding f) Tindak lanjut hasil sidang c. Bantuan Hukum Kasus Peradilan Tata Usaha Negara a) Gugatan b) Surat Pemanggilan c) Surat Kuasa d) Putusan Sidang e) Banding f) Tindak lanjut hasil sidang	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Hukum dan Kerja Sama
5	HK.04	Telaah Hukum a. Telaah Hukum Internal a) Telaahan b) Surat Penyampaian Telaahan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan	Biro Hukum dan Kerja Sama

NO KLASIFIKASI	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
6	HK.05	b. Telaah Hukum Eksternal a) Telaahan b) Surat Penyampaian Telaahan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Hukum dan Kerja Sama
7	HK.06	Dokumentasi Hukum a. Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Keputusan presiden dan Peraturan-peraturan yang dijadikan referensi b. Himpunan Produk Hukum	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Hukum dan Kerja Sama
8	HK.07	Hak Atas Kekayaan Intelektual a. Berkas pengajuan paten b. Berkas pengajuan hak cipta	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat	Biro Hukum dan Kerja Sama

NO KLASIFIKASI	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
9	HK 08	c. Administrasi pemeliharaan paten Kasus Hukum a. Pidana Berkas tentang kasus/sengketa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran : a) Proses verbal mulai dari penyelidikan, Penyidikan sampai dengan vonis b) Berkas pembelaan dan bantuan hukum c) Telaah hukum dan opini hukum b. Perdata Berkas tentang kasus/sengketa perdata : a) Proses verbal mulai dari penyelidikan, Penyidikan sampai dengan vonis b) Berkas pembelaan dan bantuan hukum c) Telaah hukum dan opini hukum Tata Usaha Negara Berkas tentang kasus/sengketa tata usaha negara : a) Proses verbal mulai dari penyelidikan, Penyidikan sampai dengan vonis b) Berkas pembelaan dan bantuan hukum c) Telaah hukum dan opini hukum Arbitrase	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan Kementerian KUKM	Biro Hukum dan Kerja Sama
		Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan KUKM	Biro Hukum dan Kerja Sama	
		Rahasia	Pejabat	Dapat	Biro Hukum	

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		Berkas tentang kasus/sengketa arbitrase : a) Proses verbal mulai dari penyelidikan, Penyidikan sampai dengan vonis b) Berkas pembelaan dan bantuan hukum c) Telaah hukum dan opini hukum		Pimpinan Tinggi Pratama	mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan Kementerian KUKM	Kerja Sama dan Biro
C	IP	INFORMASI PUBLIK				
1	IP.00	Pelayanan Informasi a. Layanan Informasi Publik b. Layanan Website	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro KTI
2	IP.01	Pelayanan Pengaduan Internal	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro KTI
3	IP.02	Kepustakaan a. Penyimpanan Deposit Bahan Pustaka a) Bukti penerimaan koleksi bahan pustaka deposit b) Administrasi pengolahan deposit bahan pustaka b. Pengadaan dan pengolahan bahan pustaka a) Buku induk koleksi	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro KTI

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN / ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
4	IP.03	<ul style="list-style-type: none"> b) Daftar buku terseleksi c) Daftar buku dalam pemesanan d) Daftar buku dalam permintaan e) Daftar penerimaan bahan pustaka hasil pembelian, hadiah deposit, hibah f) Daftar pengiriman bahan pustaka surplus g) Lembar kerja pengolahan BP (buram, pengkatalogan) h) Jajaran kartu utama / <i>Sheet list (master list)</i> i) Daftar tambahan buku (<i>assession list</i>) j) Daftar/jajaran kendali (subyek dan pengarang) c. Layanan jasa perpustakaan dan informasi <ul style="list-style-type: none"> a) Data dan statistik anggota, pengunjung dan peminjaman bahan pustaka b) Pertanyaan rujukan dan jawaban d. Preservasi bahan pustaka <ul style="list-style-type: none"> a) Survei kondisi bahan pustaka b) Reprografi bahan pustaka 	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro KTI
D. KEPEGAWAIAN						
1	KP KP.00 KP.00.00	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan dan Penetapan Pegawai <ul style="list-style-type: none"> a) Perencanaan Formasi a) Kebijakan manajemen kepegawaian b) Penyusunan dan penetapan kebutuhan 	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat	Biro MKOS

NO KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
2 KP.01 KP.01.00	ASN c) perseediaan pegawai / <i>Bezzetting</i> d) Pertimbangan formasi e) Rencana penempatan pegawai f) Standarisasi jabatan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS
	b. Usulan Formasi a) Berkas usulan dari unit kerja b) Berkas usulan permintaan persetujuan formasi kepada Menpan dan RB dan Kepala BKN	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS
	c. Persetujuan/Penetapan Formasi a) Berkas persetujuan Menpan dan RB b) Berkas penetapan formasi PNS	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS
	d. Penetapan Formasi Khusus a) Berkas penetapan formasi khusus	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS
	a. Pengumuman dan Seleksi Pengadaan ASN a. Pengumuman dan Seleksi Pengadaan ASN	Biasa/Terbuka	Pejabat	Tidak memiliki	Biro MKOS

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	KP.01.01	<ul style="list-style-type: none"> a) Berkas proses penerimaan pegawai b) Penetapan pengumuman kebutuhan c) Berkas lamaran yang diterima d) Berkas lamaran yang tidak diterima e) Open bidding/seleksi terbuka jabatan f) U sul dan kelengkapan penctapan NIP 	Biasa/Terbuka	Adminisrator	dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS
	KP.01.02	<ul style="list-style-type: none"> c. Pengangkatan ASN <ul style="list-style-type: none"> a) Nota usul pengangkatan CPNS menjadi PNS lebih dari 2 tahun b) SK CPNS dan PNS kolektif 	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS
	KP.01.03	d. Penerimaan CASN	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS

NO KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
3 KP.01.04	e. Pembekalan / Orientasi CASN	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS
3 KP.02 KP.02.00	Pangkat/Jabatan a. Ujian penyelesaian ijazah a) Edaran/pengumuman b) Permohonan/usulan dari unit kerja c) Pengumuman/penetapan kelulusan d) Sertifikat/surat tanda lulus	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro MKOS
3 KP.02.01	b. Ujian Dinas Pegawai a) Edaran/pengumuman b) Permohonan/usulan dari unit kerja c) Pengumuman/penetapan kelulusan d) Sertifikat/surat tanda lulus	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro MKOS
3 KP.02.02	c. Ujian Kompetensi a) Berkas penilaian kompetensi b) Hasil penilaian kompetensi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro MKOS

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	KP.02.03	d. Kenaikan Pangkat/golongan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro MKOS
	KP.02.04	e. Kelas Jabatan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro MKOS
	KP.02.05	f. Pengangkatan Jabatan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro MKOS
	KP.02.06	g. Pemberhentian Jabatan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian	Biro MKOS

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN / ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
4	KP.03 KP.03.00	Pengembangan Pegawai a. Perencanaan dan pengembangan karir a) Berkas perencanaan dan pengembangan karir pegawai b) Edaran/ pengumuman berkenaan dengan	Biasa/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu	Biro MKOS
	KP.02.09	j. Peninjauan Masa Kerja Pegawai	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro MKOS
	KP.02.08	l. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro MKOS
	KP.02.07	h. Usulan Jabatan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro MKOS

NO KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
KP.03.01	studi lanjut b. a) Tugas Belajar dan Ijin Belajar Surat menyurat permohonan dari pegawai dan atau usulan studi b) Laporan hasil tes masuk perguruan tinggi yang dituju c) Ikatan kerja dan surat perjanjian ijin/tugas, belajar, surat perintah/tugas belajar/SK/ surat ijin, surat-surat sponsor Laporan perkembangan studi, permohonan perpanjangan studi, ijazah	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS
KP.03.02	c. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan/ Keahlian a) Berkas penyusunan, pembinaan, pengembangan pola keterampilan/keahlian pegawai	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS
KP.03.03	d. Sertifikasi Profesi a) Portofolio b) Sertifikat/surat tanda lulus	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
5	KP.04 KP.04.00	Mutasi Pegawai	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS
		a. Promosi Pegawai				
	KP.04.01	b. Rotasi Kerja Pegawai	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS
		c. Alih Tugas Pegawai; Alih status, pindah instansi, pindah wilayah kerja, dipekerjakan, penugasan sementara, mutasi ke Balai/UPT, dan mutasi antar unit kerja				
6	KP.05 KP.05.00	Penilaian Kinerja	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian	Biro MKOS
		a. Sasaran Kinerja Pegawai				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN / ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
7	KP.06	Penggajian dan Tunjangan					
		KP.06.00	a. Kenaikan gaji berkala pegawai a) Usulan kenaikan gaji berkala b) Surat keputusan menaikkan gaji berkala	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS
		KP.06.01	b. Tunjangan Kinerja	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS
KP.06.02	c. Kesehatan a) Surat permohonan pendaftaran penawaran asuransi kesehatan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat	Biro MKOS		

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
8	KP.06.03	d. Perumahan a) Surat permohonan pendaftaran penawaran perumahan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS
		e. Rekreasi/Kesenian/Olahraga	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS
		f. Bantuan Sosial Pegawai	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS
KP.07 KP.07.00	Penghargaan a. Penerima Penghargaan	Biasa/Terbuka	Pejabat	Tidak memiliki	Biro MKOS	

NO KLASIFIKASI	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
9	KP.08 KP.07.01	Sistem Informasi Manajemen PNS a. Data/Keterangan Pegawai a) Surat Perintah Tugas b) Berkas kepegawaian dan daftar urut kepanngkatan (DUK)	Terbatas Biasa/Terbuka	Adminisrator Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro MKOS Biro MKOS

NO KLASIFIKASI	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		<p>c) Usul penetapan perubahan data dasar/status/keudukan hukum pegawai</p> <p>d) LP2P/SPT tahunan/NPWP</p>	<p>Rahasia</p> <p>Biasa/Terbuka</p>	<p>Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama</p> <p>Pejabat Administrator</p>	<p>Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan Kementerian KUKM</p> <p>Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM</p>	<p>Biro MKOS</p> <p>Biro MKOS</p>
	<p>KP.08.01</p>	<p>b. Kartu-Kartu Kepegawaian (Dokumen Identitas Pegawai)</p> <p>a) Usulan penetapan kartu pegawai</p> <p>b) Usulan penetapan kartu/karsu</p> <p>c) Usulan penetapan kartu taspen</p>	<p>Terbatas</p>	<p>Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama</p>	<p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM</p>	<p>Biro MKOS</p>

NO KLASIFIKASI	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
KP.08.02	c.	Tenaga Kontrak	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS
KP.08.03	d.	Berkas Perseorangan a) Lamaran Yang Diterima b) Nota Penetapan NIP dan Kelengkapannya c) Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN d) SK Pengangkatan CPNS e) Hasil Pengujian Kesehatan f) SK Pengangkatan CPNS g) SK Peminjauan Masa Kerja h) SK Kenaiakan Pangkat i) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/ Menduduki Jabatan dan Surat j) SK Pengangkatan dalam atau k) Pemberhentian dari Jabatan l) Berita Acara Pelantikan dan Serah Terima Jabatan m) SK Perpindahan Wilayah Kerja n) SK Perpindahan Antar Instansi	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro MKOS

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		<p>o) SK Cuti di Luar Tanggungan Negara (CL/TN)</p> <p>p) Berita Acara Pemeriksaan</p> <p>q) SK Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin PNS</p> <p>r) SK Perbantuan/Dipekerjakan/Penyugasan di Luar Instansi Induk</p> <p>s) SK Penarikan Ungu Tunggu</p> <p>t) SK Pemberian Uang Tunggu</p> <p>u) SK Pemberhentian sebagai PNS</p> <p>v) SK Pemberhentian/Pembebasan Sementara</p> <p>w) SK Pengangkatan/Pemberhentian sebagai Pejabat Negara</p> <p>x) SK Pembebasan dari Jabatan Organik karena Diangkat</p> <p>y) diangkat Sebagai Pejabat Negara</p> <p>z) SK Pengalihan PNS</p> <p>aa) Surat Keterangan Pernyataan Hilang</p> <p>bb) Surat Keterangan Kembalinya PNS yang dinyatakan hilang</p> <p>cc) SK Penggantian Nama</p> <p>dd) Surat Perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran</p> <p>ee) Akta Nikah/Ceraai</p> <p>ff) Akta Kelahiran</p> <p>gg) Isian Formulir PUPNS</p> <p>hh) Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji PNS</p> <p>ii) dan Jabatan</p> <p>jj) Surat Permohonan Menjadi Anggota Parpol</p> <p>kk) Surat Keterangan Meninggal Dunia/Hilang</p> <p>ll) Surat Keterangan Mutasi Keluarga</p> <p>mm) Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan</p>				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	KP.09	Disiplin				
	KP.09.00	a. Disiplin Pegawai a) Kode etik pegawai	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS
		qq) Penetapan Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional rr) Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus ss) Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala tt) Surat Tugas/Izin Belajar Dalam/Luar Negeri uu) Surat Izin Berpergian ke Luar Negeri vv) Surat Persetujuan dan SK Perubahan data dasar/status kedudukan hukum ww) Ijazah/Sertifikat xx) SK Penempatan/Penarikan Pegawai yy) SK Pengangkatan pada Jabatan Kedinasan zz) di luar Instansi Induk aaa) Surat Pertimbangan Status PNS bbb) SK Pengaktifan kembali sebagai PNS ccc) Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari ddd) Jabatan Organik karena dicalonkan sebagai eee) Kepala/Wakil Kepala Daerah fff) SK Penghargaan dan Tanda Jasa ggg) SK Pensiun hhh)				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		b) Daftar hadir	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS
		c) Rekapitulasi daftar hadir	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS
		d) Hukuman disiplin	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro MKOS
KP.09.01		b. Penyelesaian Pengelolaan Keberatan Pegawai	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro MKOS

NO KLASIFIKASI	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	KP.09.02	c. Perselisihan/Sengketa Pegawai	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro MKOS
	KP.09.03	d. Presensi Pegawai	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro MKOS
	KP.09.04	e. Cuti a) Cuti Tahunan b) Cuti Besar c) Cuti Sakit d) Cuti Bersalin e) Cuti Karena Alasan Penting f) Cuti di Luar Tanggungan Negara	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS
11	KP.10 KP.10.00	Pemberhentian dan Jaminan Pensiun a. Pemberhentian Pegawai Dengan Hormat	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan	Biro MKOS

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN / ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLOH
	KP.10.01	b. Pemberhentian Pegawai Tidak Dengan Hormat	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro MKOS
	KP.10.02	c. Sementara	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro MKOS
	KP.10.03	d. Batas Usia Pensiun a) Usul pemberhentian b) SK	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro MKOS
12	KP.11	Perlindungan dan Tabungan Hari Tua				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN / ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLOH
	KP.1.1.00	a. Tas pen	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro MKOS
	KP.1.1.01	b. Akses	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro MKOS
	KP.1.1.02	c. Taperas	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro MKOS
13	KP.12	Organisasi Non Kedinasan a. KORPRI	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian	Biro MKOS

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH							
E.	PR	KEPROTOKOLAN	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan							
							1	PR.00	Acara Kedinasan Menteri/Pimpinan (pelantikan, peresmian, dan jamuan)	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
							2	PR.01	Kunjungan a. Kunjungan dinas dalam dan luar negeri Menteri b. Kunjungan dinas dalam dan luar negeri pejabat lain/pegawai c. Kunjungan dinas eksternal	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Biro Umum dan Keuangan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
3	PR.02	d. Buku Tamu Apresiasi Antar Lembaga a. Pemberian penghargaan/tanda kenang-kenangan kepada masyarakat yang memiliki jasa prestasi besar b. Ucapan terima kasih, ucapan selamat, bela sungkawa, permohonan maaf dll	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
4	PR.03	Daftar nama/alamat kantor/pejabat	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
5	PR.04	Agenda Kegiatan Pimpinan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
F. KERUMAHTANGGAN						
1	RT.00	Pengelolaan Fasilitas Kantor a. Permintaan dan penggunaan ruang, gedung dan	Biasa/Terbuka	Pejabat	Tidak memiliki	Biro Umum

NO KLASIFIKASI	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
2	RT.01	fasilitas kantor lainnya b. Tata letak dan layout ruang kerja c. Penyediaan konsumsi dan akomodasi d. Penggunaan/langganan peralatan telekomunikasi meliputi: telepon, TV kabel, dan internet	Biasa/Terbuka	Adminisrator	dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
		Keertiban dan Keamanan a. Pengamanan, penjagaan dan pengawalan Terhadap personil, kantor dan rumah dinas a) Daftar nama satuan pengamanan b) Daftar jaga/daftar piket c) Catatan gangguan /pelanggaran/kejadian d) Surat izin keluar masuk atau barang e) Peningkatan kapasitas ketertiban dan keamanan b. Laporan ketertiban dan keamanan a) Laporan kehilangan, kerusakan, kecelakaan dan gangguan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
		c. Pengelolaan parkir	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian	Biro Umum dan Keuangan

NO KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN / ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
3 RT.02 KT.02.00	d. Pakakaian dinas pegawai	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
	e. Tanda pengenal pegawai	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
	Pelayanatan Kesehatan / Poliklinik a. Rekam medik pegawai	Rahasia	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
	b. Surat keterangan sehat /sakit	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Biro Umum dan Keuangan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	RT.02.01	Tempat Penitipan Anak	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
	RT.02.02	Layanan Lainnya	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang	Biro Umum dan
		c. Daftar tenaga medis dan non medis	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
		d. Kegiatan layanan kesehatan/poliklinik	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
G	TU	KETATAUSAHAAN				
1	TU.00	Rapat/Rapat Kerja/Rapat Pimpinan/Rapat Koordinasi/Rapat Teknis a Administrasi rapat Menteri/Pimpinan b Bahan rapat Menteri/Pimpinan c Risalah/Notulen/Notula Menteri d Risalah/Notulen/Notula Eselon I	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
2	TU.01	Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
3	TU.02	Tanda Kenang-kenangan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
4	TU.03	Ucapan (Ucapan terima kasih, ucapan selamat, belasungkawa, simpati, pesan/kesan, permohonan maaf, dan rekomendasi)	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
H	AR	KEARSIPAN				
1	AR.00	Pembinaan a. Apresiasi/sosialisasi/penyuluhan kearsipan/lokakarya/ <i>workshop</i> b. Bimbingan Teknis c. Persetujuan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria d. (NSPK) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah)	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
2	AR.01	Pengelolaan Arsip Dinamis a. Pengelolaan Arsip Aktif b. Pengelolaan Arsip Inaktif c. Pengelolaan Arsip Vital d. Pengelolaan Arsip Terjaga e. Alih Media Arsip	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan

NO KLASIFIKASI	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN / ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
3	AR.02	Penyusutan Arsip a. Pemindahan Arsip b. Pemusnahan Arsip	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
		c. Penyerahan Arsip	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
4	AR.03	Aplikasi Kearsipan a. Aplikasi Bidang Kearsipan (SRIKANDI) b. Arsip Elektronik	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Biro Umum dan Keuangan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
I	KU	KEUANGAN				
1	KU.00	Pelaksanaan Anggaran				
	KU.00.00	DIPA/POK a. Penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) b. Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
	KU.00.01	Pengajuan TOR/RAB	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
	KU.00.02	Penggajian dan Pembayaran Tunjangan Kinerja a. Daftar Gaji/Tunjangan/Lembur/Honorarium b. Kartu Gaji c. Bukti Setor Iuran/Kontribusi Pemerintah RI kepada Badan/Organisasi Internasional	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
	KU.00.03	Pengeluaran Anggaran	Terbatas	Pejabat	Memiliki dampak	Biro Umum

NO KLASIFIKASI	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
2	KU.01 KU.01.00	a. Pengajuan Kebutuhan Penarikan Kas b. Bukti-Bukti Tagihan dari Pihak Ketiga c. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) d. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) e. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) f. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TUP) g. Surat Perintah Membayar (SPM) h. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) i. Juklak/mekanisme pengelolaan APBN j. Bahan Nota Keuangan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian	Biro Umum dan Keuangan
	KU.01.01	Verifikasi Anggaran a. Nota Hasil Verifikasi (NHV) b. Jawaban Nota Hasil Verifikasi (JNHV)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian	Biro Umum dan Keuangan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLOH
	KU.01.02	Pembukuan Anggaran a. Buku Kas Umum (BKU) b. Buku Kas Pembantu (BKP) c. Buku/Kartu Pengawasan Kredit Anggaran d. Rekening Koran Bank e. Laporan Pertanggungjawaban(LPJ) f. Daftar Rekapitulasi Keuangan (DRK) g. Daftar Rekapitulasi pihak ketiga h. Daftar rekapitulasi PNB i. Ijin penggunaan kas besi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
	KU.01.03	Pajak Surat Setoran Pajak (SSP)	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
	KU.01.04	Penerimaan Non Pajak a. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atau Buku b. Penerimaan, Buku Setor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
	KU.01.05	Pengembalian Belanja	Terbatas	Pejabat	Memiliki dampak	Biro Umum

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLOH
		a. Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa termasuk dokumen-dokumen pembayarannya: a) Barang pakai habis b) Barang inventaris: 1) Barang Bergerak/Barang Inventaris 2) Tanah dan Bangunan c) Jasa d) Software Komputer e) Pengumuman Lelang f) Dokumen Prakuafikasi g) Dokumen Peninjauan Lapangan h) Berita Acara Penjelasan Pekerjaan i) Berita Acara Pelelangan j) U sulan Calon Pemenang k) Penetapan Pemenang l) Surat Perintah Kerja (SPK)	Biasa/Terbuka	Pimpinan Tinggi Pratama	Yang dapat menggangu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	dan Keuangan
		b. Bukti Setor Sisa Anggaran Lebih atau Bukti Setor Pengembalian Belanja	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat menggangu kinerja Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
		c. Bukti Setor Bunga dan atau Jasa Giro Bank	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat menggangu kinerja Kementerian	Biro Umum dan Keuangan

NO KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN / ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLOH
KU.01.06	d. Laporan Realisasi Pendapatan Negara dari masing-masing Satuan Kerja SKKP (Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran)	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
KU.01.07	Keterangan Penghasilan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
3 KU.02 KU.02.00	Laporan Keuangan Dokumen Sumber Akuntansi a. Berita Acara Pemeriksaan Kas b. Kas/Regisiter Penutupan Kas	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Biro Umum dan Keuangan

NO KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
KU.02.01	Berita Acara Rekonsiliasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
	a. Manual Implementasi Sistem Akuntansi Instansi (SAl)	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
	b. Kebijakan Akuntansi	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
	c. Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
	d. Laporan Realisasi Semesteran APBN	Terbatas	Pejabat	Memiliki dampak	Biro Umum

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN / ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
4	KU.03 KU.03.00	Bantuan/Pinjaman Luar Negeri Daftar Proyek-Proyek yang akan dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri (<i>Blue Book</i>)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
	KU.02.02	Laporan Keuangan a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) b. Neraca c. Laporan Arus Kas (LAK) d. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) e. Laporan Barang Milik Negara (BMN) f. Laporan Realisasi Pendapatan Negara	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
	KU.03.01	Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (<i>Grey book</i>)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan

NO KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
KU.03.02	Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan Dokumen Sejenisnya	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
KU.03.03	Dokumen Loan Agreement Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN), Legal Opinion, Perjanjian Penerusan Pinjaman dan Surat Menyurat dengan Lender	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
KU.03.04	Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
KU.03.05	Aplikasi Penarikan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) berikut lampirannya: a. Pengembalian b. Prosedur pembayaran/transfer langsung c. Komitmen khusus/pembukaan L/C d. Akun khusus/dana imrest	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian	Biro Umum dan Keuangan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLOH
		e. Dokumen Pengesahan atas Penerimaan Hibah Luar Negeri f. Pemberitahuan pencairan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
	KU.03.06	Otorisasi Penarikan Dana (<i>Payment Advice</i>)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
	KU.03.07	Realisasi Pencairan Dana Pinjaman/Hibah Luar negeri, yaitu : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), SPM beserta lampirannya antara lain: SPP, Kontrak, BA, dan Data Pendukung lainnya.	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
	KU.03.08	Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor (<i>Replenishment</i>) meliputi antara lain : Nomor <i>Objection Letter</i> (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA), Statement of Expenditure (SE)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
	KU.03.09	<i>Staff Appraisal Report</i>	Terbatas	Pejabat	Memiliki dampak	Biro Umum

NO KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN / ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
KU.03.10	Laporan / Report a. <i>Progress Report</i> b. <i>Monthly Report</i> c. <i>Quarterly Report</i> d. <i>Final Report/ Completion Report</i>	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat menggangu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
KU.03.11	Laporan Hutang Negara a. Laporan Pembayaran Hutang Negara b. Laporan Posisi Hutang Negara	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat menggangu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
KU.03.12	Ketentuan/Peraturan yang Menyangkut Pinjaman/ Hibah Luar Negeri	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat menggangu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
J	OT	ORGANISASI DAN TATA LAKSANA				
1	OT.00 OT.00.00	Struktur Organisasi a. Pembentukan, perubahan, dan penyempurnaan organisasi Pembentukan, penataan di unit utama dan UPT	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS
	OT.00.01	b. Evaluasi Organisasi Pengukuran dan penilaian kinerja organisasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS
	OT.00.02	c. Tugas, fungsi, dan susunan organisasi unit kerja	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS
		d. Rincian Tugas Unit Kerja	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat	Biro MKOS

NO KLASIFIKASI	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
2	OT.01 OT.01.00	Analisis Jabatan a. Analisis Jabatan Struktural	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS
	OT.01.01	b. Analisis Jabatan Fungsional Tertentu	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS
	OT.01.02	c. Analisis Jabatan Pelaksana/Fungsional Umum	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS

NO KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
3 OT.02	Evaluasi Jabatan Evaluasi jabatan struktural, fungsional tertentu dan pelaksanaan/ fungsional umum di lingkungan Kementerian	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS
4 OT.03	Analisis Beban Kerja a. Nama jabatan b. Uraian jabatan c. Perhitungan beban kerja	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS
5 OT.04	Uraian Jabatan dan Tata Kerja Uraian Jabatan dan Tata Kerja	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS
6 OT.05 OT.05.00	Tata Laksana a. Penyusunan dan penyetaraan Tata Cara/Peta Proses Bisnis	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang	Biro MKOS

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		Penyusunan dan penyelarasan proses bisnis mulai dari perencanaan hingga penetapan			dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	
	OT.05.01	b. Evaluasi Tata Cara/Peta Proses Bisnis Peta proses bisnis	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS
	OT.05.02	c. Penyusunan dan Penyelarasan Sistem dan Prosedur Kerja Penyusunan dan penyelarasan SOP mulai dari perencanaan hingga penetapan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS
	OT.05.03	d. Monitoring dan Evaluasi Sistem dan Prosedur Kerja	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
7	OT.06	Reformasi Birokrasi SOP/Prosedur Tetap	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS
K	BJ	PENGADAAN BARANG DAN JASA				
1	BJ.00 BJ.00.00	Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa a. Penyusunan Rencana Kebutuhan a) Daftar rencana kebutuhan BMN (RKBMN) b) Usulan kebutuhan perlengkapan/barang inventaris kantor	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
	BJ.00.01	b. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa a) <i>Daftar company profile</i> b) <i>Surat rekomendasi/penilaian kualifikasi</i>	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Biro Umum dan Keuangan

NO KLASIFIKASI	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	BJ.00.02	c. Penyusunan Standar Harga Satuan Barang Persediaan c) Daftar rekaman mampu d) Tata ruang/ <i>layout</i> ruang kerja	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
2	BJ.01 BJ.01.00	Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa a. Barang Bergerak	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
	BJ.01.01	b. Barang Tidak Bergerak	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	BJ.01.02	c. Barang Habis Pakai	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
	BJ.01.03	d. Jasa Konsultasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
	BJ.01.04	e. Jasa Lainnya	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
L	PW	PENGAWASAN				
1	PW.00	Audit a. Pelaksanaan Audit	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Patama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan	Inspektorat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN / ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLOH
2	PW.01	Revisi a. Pelaksanaan Revisi b. Laporan Hasil Revisi (LHR)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Inspektorat
3	PW.02	Evaluasi a. Pelaksanaan Evaluasi b. Laporan Hasil Evaluasi (LHE)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Inspektorat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN / ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGO LAH
4	PW.03 PW.03.00	Penguatan Pengawasan a. Gratifikasi a) Renja Gratifikasi b) Sosialisasi c) Rencana Aksi d) Monitoring e) Evaluasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Inspektorat
	PW.03.01	b. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) a) Sosialisasi b) Pendampingan c) Penjaminan Kualitas d) Pemantauan rencana Aksi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Inspektorat
	PW.03.02	c. <i>Whistle Blowing System</i> (WBS) a) Renja Gratifikasi b) Sosialisasi c) Rencana Aksi d) Monitoring Evaluasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Inspektorat
	PW.03.03	d. Benturan Kepentingan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian	Inspektorat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN / ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	PW.03.04	c. Zona Integritas a) Reviu LKE ZI WBK b) SK Tim c) SK Unit	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Inspektorat
	PW.03.05	f. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) a) SK Tim b) Pengisian kertas kerja c) Penilaian Mandiri	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Inspektorat
	PW.03.06	Stock Opname Barang Milik Negara a. Pelaksanaan b. Berita Acara	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Inspektorat
	PW.03.07	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) a. Surat Edaran Inspektur b. Monitoring	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Inspektorat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN / ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLOH
	PW.03.08	Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) a. Surat Edaran LHKASN b. Monitoring Kepatuhan Pelaporan c. Verifikasi Laporan LHKASN	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Inspektorat
	PW.03.09	Program Pemulihan Ekonomi Nasional	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Inspektorat
	PW.03.10	Pengarusutamaan Gender Reviu General <i>Analysis Pathway</i> dan Gender	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Inspektorat
	PW.03.11	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Reviu P3DN	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan	Inspektorat

NO KLASIFIKASI	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN / ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
5	PW.04 PW.04.00	Konsultasi Pengawasan Pengadaan barang dan jasa Laporan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Inspektorat
	PW.04.01	Akuntabilitas Kinerja Laporan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Inspektorat
	PW.04.02	Akuntabilitas Keuangan Laporan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Inspektorat
	PW.04.03	Badan Layanan Umum (BLU)	Terbatas	Pejabat	Memiliki dampak	Inspektorat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN / ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
6	PW.05 PW.05.00	Pemantuan Tindak Lanjut Pemantuan tindak lanjut hasil pemeriksaan Internal	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Inspektorat
	PW.05.01	Pemantuan tindak lanjut hasil pemeriksaan Eksternal Surat Edaran Terkait tindak lanjut	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Inspektorat
	PW.05.02	Pemantuan Pelaksanaan Kegiatan/Program a Monitoring Penyerapan anggaran b Monitoring Pelaksanaan RB	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Inspektorat

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN / ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
7	PW.06 PW.06.00	Kegiatan Pengawasan Lainnya Administrasi Pengawasan Administrasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Inspektorat
	PW.06.01	Perencanaan Pengawasan a. PKPT b. Renja	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Inspektorat
	PW.06.02	Pedoman/Kebijakan Pengawasan a. Pembentukan Tim b. Draft Pedoman c. Pedoman Final d. Sosialisasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Inspektorat
M	BN	PENGLOLOAN BARANG MILIK NEGARA				
1	BN.00	Penggunaan a. Surat usulan penggunaan/permohonan	Biasa/Terbuka	Pejabat	Tidak memiliki	Biro Umum

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN / ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
2	BN.01	pemanfaatan a. Surat usulan penggunaan/permohonan Penggunaan barang b. Berita Acara Serah Terima c. SK e. Surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
3	BN.02	Penyimpanan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
4	BN.03	Pengamanan a. Laporan pengamanan/penjagaan barang milik negara	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
5	BN.04	Distribusi/Penyaluran a. Daftar barang masuk/ke luar	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
6	BN.05	Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Negara a. Surat usulan/permohonan fasilitasi b. Surat penawaran pada/dari rekanan c. SK Perjanjian Kerja d. Dokumen kontrak kerja e. Surat perintah kerja (SPK) f. Berita acara pekerjaan g. kartu kontrol barang h. form <i>service</i> i. penguasaan surat-surat barang bergerak/kendaraan j. daftar piket kebersihan dan taman k. laporan pemeliharaan/perbaikan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
7	BN.06	Pemindahhantaran a. Surat usulan penghapusan b. panita penghapusan c. Surat persetujuan/SK d. Berita acara penghapusan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLOH
8	BN.07	Penghapusan Barang Milik Negara a. Surat Usulan b. Surat persetujuan/SK	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
9	BN.08	Pengawasan dan Pengendalian a. Laporan pemantauan penggunaan, pencertiban aset	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
10	BN.09	Pemantauan/Pemeriksaan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
11	BN.10	Inventarisasi/Pencatatan a. Pendaftaran dan pencatatan barang milik negara b. Daftar inventaris barang	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian	Biro Umum dan Keuangan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN KUKM	UNIT PENGOLAH
12	BN.11	Penilaian Barang Milik Negara	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
13	BN.12	Pelaporan Barang Milik Negara a. Laporan barang persediaan b. Berita acara rekonsiliasi internal c. Laporan tengah tahunan/semester d. Berita acara rekonsiliasi eksternal e. laporan tahunan f. Pelaporan barang milik negara melalui sistem informasi manajemen dan akuntansi BMN	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Umum dan Keuangan
N	PA	PERENCANAAN KINERJA DAN ANGGARAN				
1	PA.00	Usulan Perencanaan Program Kerja a. Usulan unit kerja beserta data pendukung b. Usulan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah c. Program Kerja Tahunan Unit Kerja d. Program Kerja Tahunan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro MKOS

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
2	PA.01 PA.01.00	Pokok-pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang/Master Plan (RPJ) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro MKOS
	PA.01.01	b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro MKOS
	PA.01.02	c. Rencana Strategis (Renstra)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro MKOS
3	PA.02 PA.02.00	Rencana Kerja Rencana Kerja Kementerian Koperasi dan UKM a. Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah b. Rencana Kerja Tahunan c. Mustranbangnas	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan	Biro MKOS

NO KLASIFIKASI	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	PA.02.01	d. Rakorbangpus Penetapan / Kontrak Kinerja a. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah b. Pimpinan Unit Kerja	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro MKOS
4	PA.03 PA.03.00	Penyusunan Rencana Anggaran a. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) Daftar Isian Program dan Anggaran (DIPA) Petunjuk Operasional (PO) Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA) Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNPB) Standar Biaya Khusus (SBK)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro MKOS
	PA.03.01	Revisi/Perubahan Dokumen Anggaran a. Revisi DIPA b. PO	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro MKOS
5	PA.04	Laporan				

NO KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLOH
PA.04.00	a. Laporan Berkala a) Laporan Harian Unit Kerja b) Laporan Mingguan Unit Kerja c) Laporan Bulanan Unit Kerja d) Laporan Triwulan Unit Kerja e) Laporan Semesteran f) Laporan Tahunan Unit Kerja g) Laporan Tahunan Kementerian Koperasi dan h) Usaha Kecil dan Menengah	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro MKOS
PA.04.01	b. Laporan Khusus a) Laporan Pemantauan Prioritas b) Laporan Pelaksanaan Kegiatan atas Permintaan Eksternal c) Laporan atas Pelaksanaan Kegiatan/Program tertentu	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro MKOS
PA.04.02	c. <i>Progress Report</i>	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro MKOS
PA.04.03	d. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) a) LAKIP Unit Kerja b) LAKIP Kementerian Koperasi dan UKM	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan	Biro MKOS

NO KLASIFIKASI	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	PA.04.04	Evaluasi Program a. Evaluasi program unit kerja b. Evaluasi program Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Monitoring dan Evaluasi Program a. Anggaran Unit Kerja b. Anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro MKOS
6	PA.05 PA.05.00	Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (RAPBN) dan RUU APBN-P Penyusunan RAPBN a. Kebijakan Umum, Renstra, Strategi dan Prioritas a) Dokumen Rencana Strategis atas Rencana Kerja Jangka Panjang atau Rencana Kerja Lima Tahunan b) Dokumen Rencana Kerja Tahunan Kementerian b. Dokumen Rencana Anggaran Kerja Instansi Pemerintah (RAKIP) dan Dokumen Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) c. Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja Instansi Pemerintah (Raskip)/Standar Biaya Khusus (SBK)	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS

NO KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLOH
PA.05.01	Penyampaian RAPBN kepada DPR-RI a. Pengantar Nota Keuangan Pemerintah dan Rancangan Undang-undang APBN: a) Pidato Presiden Pengantar Nota Keuangan b) Lampiran Pidato c) Nota Keuangan d) RUU APBN b. Risalah rapat pembahasan anggaran Kementerian KUKM RI dengan kementerian keuangan, bappenas, c. Notulen Pembahasan RUU APBN oleh Pemerintah dan DPR RI d. Notulen Rapat Paripurna Persetujuan RUU APBN a) Tanggapan masing-masing Fraksi b) Jawaban Pemerintah atas tanggapan Fraksi- fraksi c. Nota Jawaban DPR-RI terkait dengan Pembahasan RUU APBN dengan Komisi VI DPR RI	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro MKOS
PA.05.02	Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS
PA.05.03	Keputusan Presiden tentang Rincian APBN	Biasa/Terbuka	Pejabat	Tidak memiliki	Biro MKOS

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	PA.05.04	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Revisinya	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS
	PA.05.05	Usulan Pemerintah Mengenai Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (RUU APBN-P)	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro MKOS
	PA.05.06	Notulen Pembahasan RUU APBN-P oleh Pemerintah dan DPR	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLOH
	PA.05.07	Notulen Rapat Paripurna Persetujuan RUU APBN-P: a. Tanggapan masing-masing fraksi b. Jawaban Pemerintah atas Tanggapan Fraksi-fraksi	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS
	PA.05.08	Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (UU APBN-P)	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS
	PA.05.09	Keputusan Presiden tentang Rincian APBN-P	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro MKOS
O	TI	TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI				
1	TI.00	Perencanaan dan Pengembangan Teknologi Informasi a. Rencana Strategis / master plan Pembangunan Sistem	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan	Biro KTI

NO KLASIFIKASI	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN / ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
2	TI.01	Operasional Teknologi Informasi a. Sistem informasi b. Sistem aplikasi c. Infrastruktur	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro KTI
3	TI.02	Perencanaan dan Pemutakhiran Data a. Formulir isian b. Daftar tugas perencanaan c. Jadwal pelaksanaan d. Laporan hasil perencanaan dan pemutakhiran data Migrasi Sistem Aplikasi dan Data a. Perencanaan migrasi b. Pelaksanaan migrasi c. Berita Acara kegiatan migrasi d. Daftar sistem aplikasi dan data yang dimigrasi e. Laporan hasil migrasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro KTI
3	TI.02	Pengolahan Data dan Dukungan Teknologi Informasi				

NO KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN / ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLOH
	Dokumen Hosting a. Formulir permintaan <i>hosting</i> b. Laporan hasil uji kelayakan c. Laporan pelaksanaan <i>hosting</i>	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro KTI
	d. Layanan Back-up data digital	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro KTI
	e. Database	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro KTI
	f. Design Informasi dan Komunikasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro KTI

NO KLASIFIKASI	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN / ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
II P	SUBSTANTIF PK PK.00	PERKOPERASIAN Pengembangan dan Pembaruan Koperasi Data dan Informasi Potensi Koperasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembangan dan Pembaruan Perkoperasian
1	PK.00.00	g. Evaluasi Sistem dan Media a. Identifikasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro KTI
PK.00.01	Revitalisasi Pasar Rakyat	b. Verifikasi	Terbatas	Asisten Deputi Pengembangan dan Pembaruan Perkoperasian		

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN / ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		a. Pengajuan Proposal	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembangan dan Pembaruan Perkoperasian
		b. Verifikasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembangan dan Pembaruan Perkoperasian
		c. Keputusan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembangan dan Pembaruan Perkoperasian
	PK.00.02	Koperasi Pengelola Factory Sharing a. Verifikasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian	Asisten Deputi Pengembangan dan Pembaruan Perkoperasian

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN / ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		b. Pembinaan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembangan dan Pembaruan Perkoperasian
		c. Pendampingan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembangan dan Pembaruan Perkoperasian
		d. Monitoring	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembangan dan Pembaruan Perkoperasian
	PK.00.03	Korporatisasi Petani dan Nelayan a. Koordinasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan	Asisten Deputi Pengembangan dan Pembaruan

NO KLASIFIKASI	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN / ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		b. Pendataan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Perkoperasian Asisten Deputi Pengembangan dan Pembaruan Perkoperasian
		c. Pembinaan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembangan dan Pembaruan Perkoperasian
		d. Pendampingan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembangan dan Pembaruan Perkoperasian
		e. Monitoring	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat	Asisten Deputi Pengembangan dan

NO KLASIFIKASI	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN / ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	f. Evaluasi		Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembangan dan Pembaruan Perkoperasian
PK.00.04	Perluasan Jaringan Usaha Koperasi	a. Koordinasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembangan dan Pembaruan Perkoperasian
	b. Pendataan		Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembangan dan Pembaruan Perkoperasian
	c. Pembinaan		Biasa/Terbuka	Pejabat	Tidak memiliki	Asisten Deputi

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN / ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		d. Pendampingan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembangan dan Pembaruan Perkoperasian
		e. Monitoring	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembangan dan Pembaruan Perkoperasian
		f. Evaluasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembangan dan Pembaruan Perkoperasian

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN / ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLOH
2	PK.01 PK.01.00	Pembiayaan dan Penjaminan Koperasi Permodalan dan Penjaminan a. Pendampingan b. Rekonsiliasi Data Permodalan dan Penjaminan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pembiayaan dan Penjaminan Koperasi
	PK.01.01	Akses dan Skema Pembiayaan a. Sosialisasi b. Pendampingan c. Pendataan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pembiayaan dan Penjaminan Koperasi
	PK.01.02	Lembaga Keuangan Non Bank a. Sosialisasi b. Pendampingan c. Pendataan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pembiayaan dan Penjaminan Koperasi
	PK.01.03	Revitalisasi dan Fasilitasi a. Sosialisasi b. Pendampingan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian	Asisten Deputi Pembiayaan dan Penjaminan Koperasi

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN / ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN KUKM	UNIT PENGOLOH
	PK.01.04	Fasilitasi Akta Pendirian Koperasi	Biasa /Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pembiayaan dan Penjaminan Koperasi
3	PK.02 PK.02.00	Pengawasan Koperasi Rencana Pengawasan Koperasi a. Rekap hasil laporan RAT b. Pembagian tugas pemeriksaan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengawasan Koperasi
	PK.02.01	Pelaksanaan Pengawasan Koperasi a. Pemberitahuan dan surat tugas b. Dokumen laporan keuangan dan legalitas c. Berita Acara Hasil Pemeriksaan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengawasan Koperasi
	PK.02.02	Evaluasi Hasil Pengawasan Koperasi a. Laporan Hasil Pemeriksaan b. Rapat Komite	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Asisten Deputi Pengawasan Koperasi

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	PK.02.03	c. Berita Acara d. Sertifikat Pemeriksaan Kesehatan a. Akuntabilitas Koperasi a. Usulan Dokumen Perubahan Pengurus dan Pengawas b. Pendaftaran Notaris Akta Pembuat Koperasi c. Formulir dan Usulan Sertifikat NIK	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengawasan Koperasi
	PK.02.04	Pembubaran Koperasi a. Identifikasi Koperasi Tidak Aktif dan ODS b. Penetapan SK c. Pengusulan daerah Revisi Perubahan Penetapan	Terbatas Terbatas Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pejabat	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM Memiliki dampak	Asisten Deputi Pengawasan Koperasi Asisten Deputi Pengawasan Koperasi Asisten Deputi

NO KLASIFIKASI	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN / ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	SK			Pimpinan Tinggi Pratama	Yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Pengawasan Koperasi
		d. Tindak Lanjut Revisi Perubahan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengawasan Koperasi
		e. Pengumuman Rencana Pembubaran Koperasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengawasan Koperasi
		f. Berita Acara Tim Penyelesai	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengawasan Koperasi

NO KLASIFIKASI	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	PK.03.02	Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi a. Usulan Formasi Fungsional Pengawas Koperasi di Lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM b. Persetujuan Formasi Pengawas Koperasi untuk Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) c. Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan/Pedoman terkait Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi d. Surat Edaran terkait Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembangan SDM Perkoperasian dan JF
	PK.03.03	Pengangkatan Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi a. Rekomendasi Fungsional Pengawas Koperasi melalui Perpindahan Jabatan b. Hasil Penilaian Seleksi Pengangkatan melalui Perpindahan Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi c. Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan/Pedoman terkait Perpindahan Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi d. Surat Edaran terkait Perpindahan Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembangan SDM Perkoperasian dan JF
	PK.03.05	Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi a. Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi b. Berita Acara Hasil Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi c. Sidang Hasil Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembangan SDM Perkoperasian dan JF

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		d. Pengumuman Hasil Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi e. Sertifikat Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi				
		USAHA MIKRO				
1	UM.00 UM.00.00	Pembayaan Usaha Mikro Akses dan skema pembiayaan a. Pendampingan KUR b. SK Pendamping c. Monitoring	Biasa/Terbuka Terbatas Terbatas	Pejabat Administrator Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pembayaan Usaha Mikro Asisten Deputi Pembayaan Usaha Mikro Asisten Deputi Pembayaan Usaha Mikro

NO KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN / ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLOH
UM.00.01	Peningkatan Permodalan Usaha Mikro a. Usulan daerah b. Verifikasi c. Penetapan penerimaan bantuan d. Evaluasi	Terbatas Terbatas Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pembinaan Usaha Mikro Asisten Deputi Pembinaan Usaha Mikro Asisten Deputi Pembinaan Usaha Mikro

NO KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN / ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLOH
2 UM.01 UM.01.00	d. Laporan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pembinaan Usaha Mikro
	e. Monitoring	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian	Asisten Deputi Pembinaan Usaha Mikro
	f. Evaluasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pembinaan Usaha Mikro
	Perindungan dan Kemudahan Usaha Mikro Perizinan Usaha a. Pendampingan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian	Asisten Deputi Perlindungan dan Kemudahan Usaha Mikro

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN / ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	UM.01.01	Sertifikasi Produk a. Fasilitasi b. Pendampingan	Biasa /Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Asisten Deputi Perlindungan dan Kemudahan Usaha Mikro
	UM.01.02	Pemetaan Data Usaha Mikro a. Pendataan Usaha Mikro Daerah	Biasa /Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Asisten Deputi Perlindungan dan Kemudahan Usaha Mikro
	UM.01.03	Bantuan Pemerintah a. Koordinasi b. Pendataan c. Penetapan d. Monitoring e. Evaluasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Perlindungan dan Kemudahan Usaha Mikro
3	UM.02 UM.02.00	Pengembangan Rantai Pasok Usaha Mikro Kemitraan a. Koordinasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Asisten Deputi Pengembangan

NO KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN / ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLOH
	b. Perjanjian kerja sama	Biasa/Terbuka	Pejabat Tinggi Pratama	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembangan Rantai Pasok Usaha Mikro
	c. Fasilitasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembangan Rantai Pasok Usaha Mikro
	d. Pendampingan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembangan Rantai Pasok Usaha Mikro
	e. Monitoring	Biasa/Terbuka	Pejabat	Tidak memiliki	Asisten Deputi

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN / ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	UM.02.01	Pemasaran / <i>E-Commerce</i> a. Koordinasi b. Perjanjian kerja sama c. Fasilitasi	Terbatas Biasa / Terbuka Biasa / Terbuka	Administrator Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pejabat Administrator Administrator	Yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Pengembangan Rantai Pasok Usaha Mikro Asisten Deputi Pengembangan Rantai Pasok Usaha Mikro Asisten Deputi Pengembangan Rantai Pasok Usaha Mikro

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN / ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	UM.02.02	d. Pendampingan e. Monitoring Jaringan Usaha a. Koordinasi b. Perjanjian kerja sama	Biasa/Terbuka Terbatas Terbatas Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Asisten Deputi Pengembangan Rantai Pasok Usaha Mikro Asisten Deputi Pengembangan Rantai Pasok Usaha Mikro Asisten Deputi Pengembangan Rantai Pasok Usaha Mikro

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN / ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		c. Fasilitasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembangan Rantai Pasok Usaha Mikro
		d. Pendampingan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembangan Rantai Pasok Usaha Mikro
		e. Monitoring	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembangan Rantai Pasok Usaha Mikro
	UM.02.03	Kluster/Komoditas Usaha Mikro a. Koordinasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Asisten Deputi Pengembangan Rantai Pasok

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN / ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
b.	Penyusunan Model Bisnis		Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembangan Rantai Pasok Usaha Mikro
c.	Perjanjian kerja sama		Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembangan Rantai Pasok Usaha Mikro
d.	Fasilitasi		Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembangan Rantai Pasok Usaha Mikro
e.	Pendampingan		Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat	Asisten Deputi Pengembangan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN / ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLOH
4	UM.03 UM.03.00	Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro Pelatihan a. Koordinasi b. Pelatihan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro
			Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro

NO KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
UM.03.01	c. Monitoring	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat menganngu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembangan Rantai Pasok Usaha Mikro
	d. Evaluasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat menganngu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembangan Rantai Pasok Usaha Mikro
	a. Koordinasi b. Pelatihan c. Monitoring d. Evaluasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat menganngu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembangan Rantai Pasok Usaha Mikro
	UM.03.02	Pengembangan Kompetensi Usaha Mikro Standar Nasional	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat menganngu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
5	UM.04 UM.04.00	Fasilitasi Hukum dan Konsultasi Usaha Bantuan dan Pendampingan Hukum bagi Usaha Mikro a. Hasil bantuan hukum b. Hasil pendampingan hukum c. Hasil konsultasi usaha mikro d. Identifikasi e. SK pelaksanaan f. Laporan hasil pelaksanaan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat menganalisis pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputy Fasilitasi Hukum dan Konsultasi Usaha
	UM.04.01	Regulasi dan Kebijakan bagi Usaha Mikro a. Penyusunan regulasi kebijakan usaha mikro	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat menganalisis pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputy Fasilitasi Hukum dan Konsultasi Usaha
		b. Sosialisasi regulasi kebijakan usaha mikro	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat menganalisis pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputy Fasilitasi Hukum dan Konsultasi Usaha
R	UK	USAHA KECIL MENENGAH				
1	UK.00	Pembiayaan dan Investasi UKM				

NO KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
UK.00.00	Pembiayaan UKM a. Koordinasi b. Sosialisasi c. Profiling Data UKM d. Kurasi	Biasa/Terbuka Terbatas Terbatas Terbatas	Pejabat Administrator Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi UKM Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi UKM Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi UKM Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi UKM

NO KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN / ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
UK.00.01	e. Laporan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pembinaan dan Investasi UKM
	a. Koordinasi Investasi UKM	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pembinaan dan Investasi UKM
	b. Kurasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pembinaan dan Investasi UKM
	c. Pendampingan a) Perpajakan b) Investasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan	Asisten Deputi Pembinaan dan Investasi UKM

NO KLASIFIKASI	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		d. Konsultasi Pembiayaan dan Investasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi UKM
		e. Laporan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi UKM
		f. Monitoring	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi UKM
		g. Evaluasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
2	UK.01 UK.01.00	Pengembangan SDM UKM Peningkatan Kapasitas Pelaku UKM a. Koordinasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembangan SDM UKM
		b. Data Peserta	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembangan SDM UKM
		c. Kurasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembangan SDM UKM

NO KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	d. Kampus UKM	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembangan SDM UKM
	c. Workshop	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembangan SDM UKM
	f. Katalog UKM	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembangan SDM UKM
	g. Laporan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembangan SDM UKM

NO KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
UK.01.01	h. Monitoring	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputy Pengembangan SDM UKM
	i. Evaluasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian	Asisten Deputy Pengembangan SDM UKM
	Penguatan Kapasitas Pendamping UKM a. Koordinasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputy Pengembangan SDM UKM
	b. Data Calon Peserta Online dan Offline	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian	Asisten Deputy Pengembangan SDM UKM

NO KLASIFIKASI	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		c. Kurasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembangan SDM UKM
		d. <i>Training</i>	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembangan SDM UKM
		e. <i>Coaching</i>	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembangan SDM UKM
		f. <i>Consulting</i>	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Asisten Deputi Pengembangan SDM UKM

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN / ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
g.		Mentoring	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembangan SDM UKM
h.		Uji Sertifikasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembangan SDM UKM
l.		Data Pendampingan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembangan SDM UKM
j.		Evaluasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan	Asisten Deputi Pengembangan SDM UKM

NO KLASIFIKASI	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
3	UK.02 UK.02.00	Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok Pengembangan Kawasan UKM a. Koordinasi b. Pengumpulan usulan proposal c. Penetapan usulan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok
		k. Laporan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembangan SDM UKM
			Terbatas	Pejabat	Memiliki dampak	Asisten Deputi

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN / ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		d. Studi Kelayakan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok
		e. Sosialisasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok
		f. Pendampingan <i>Factory Sharing</i>	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok

NO KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	g. Pembangunan fisik Factoring sharing	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok
	h. Laporan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok
	i. Monitoring	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok
	j. Evaluasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok

NO KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
UK.02.01	Pengembangan Rantai Pasok UKM a. Koordinasi b. Pengumpulan data c. Sosialisasi d. Pendampingan	Biasa/Terbuka Terbatas Terbatas Terbatas	Pejabat Administrator Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Asisten Deputi Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok Asisten Deputi Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok Asisten Deputi Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok

NO KLASIFIKASI	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		e. Sertifikasi standarisasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok
		f. Laporan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok
		g. Monitoring	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok
		h. Evaluasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan	Asisten Deputi Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok

NO KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLOH
4 UK.03 UK.03.00	Kemitraan Perluasan Pasar UKM Kemitraan UKM a. Koordinasi b. Pengumpulan data c. Kurasi d. Sosialisasi Laporan	Biasa/Terbuka Terbatas	Pejabat Administrator Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pejabat	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Konsultasi Bisnis dan Pendampingan Asisten Deputi Konsultasi Bisnis dan Pendampingan Asisten Deputi

NO KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	e. Monitoring	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Konsultasi Bisnis dan Pendampingan
UK.03.01	Perluasan Pasar UKM a. Koordinasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Konsultasi Bisnis dan Pendampingan
	f. Evaluasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Konsultasi Bisnis dan Pendampingan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN / ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLOH
		b. Profiling Data	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Konsultasi Bisnis dan Pendampingan
		c. Kurasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Konsultasi Bisnis dan Pendampingan
		d. Promosi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Konsultasi Bisnis dan Pendampingan
		e. Laporan	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Asisten Deputi Konsultasi Bisnis dan Pendampingan

NO KODING	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
S	WU	KEWIRAUSAHAAN				
1	WU.00 WU.00.00	Konsultasi Bisnis dan Pendampingan Konsultasi Bisnis Pengembangan, pendampingan dan pelatihan kewirausahaan, sinergi kemitraan dan tenaga pendukung lainnya a. Koordinasi b. Pelaksanaan	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian	Asisten Deputi Konsultasi Bisnis dan Pendampingan Asisten Deputi Konsultasi Bisnis dan Pendampingan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN / ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
c.	Laporan		Biasa/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat menggangu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Konsultasi Bisnis dan Pendampingan
d.	Monitoring dan Evaluasi		Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat menggangu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Konsultasi Bisnis dan Pendampingan
e.	Penyusunan Perjanjian Kerjasama		Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat menggangu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Konsultasi Bisnis dan Pendampingan
f.	Perjanjian Kerjasama		Biasa/ Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat menggangu pelaksanaan tugas dan fungsi	Asisten Deputi Konsultasi Bisnis dan Pendampingan

NO KLASIFIKASI	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	WU.00.01	Pendampingan Usaha Pengembangan, pendampingan dan pelatihan kewirausahaan, identifikasi wirausaha, penyusunan pedoman pendampingan wirausaha, sinergi kemitraan dan tenaga pendukung lainnya a. Koordinasi b. Pelaksanaan c. Laporan	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator Pejabat Administrator Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Konsultasi Bisnis dan Pendampingan Asisten Deputi Konsultasi Bisnis dan Pendampingan Asisten Deputi Konsultasi Bisnis dan Pendampingan

NO KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN / ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGO LAH
WU.00.02	d. Monitoring dan Evaluasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Konsultasi Bisnis dan Pendampingan
	e. Penyusunan Perjanjian Kerjasama	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Konsultasi Bisnis dan Pendampingan
	f. Perjanjian Kerjasama	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Konsultasi Bisnis dan Pendampingan
	Pernyataan Kerjasama Pernyataan pendampingan usaha dan konsultasi bisnis, dan penumbuhan kewirausahaan a. Koordinasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat	Asisten Deputi Konsultasi

NO KLASIFIKASI	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		b. Pelaksanaan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputy Konsultasi Bisnis dan Pendampingan
		c. Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputy Konsultasi Bisnis dan Pendampingan
		d. Monitoring dan Evaluasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputy Konsultasi Bisnis dan Pendampingan

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN / ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
2	WU.01 WU.01.00	e. Penyusunan Perjanjian Kerjasama f. Perjanjian Kerjasama Pengembangan Teknologi Informasi dan Inkubasi Usaha Pengembangan Teknologi Informasi Usaha Pengembangan, pendampingan dan pelatihan kewirausahaan, sistem informasi kewirausahaan, sinergi kemitraan dan tenaga pendukung lainnya a. Koordinasi b. Pelaksanaan	Terbatas Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pejabat Administrator Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM Tidak memiliki	Asisten Deputi Konsultasi Bisnis dan Pendampingan Asisten Deputi Konsultasi Bisnis dan Pendampingan Asisten Deputi Pengembangan Teknologi Informasi dan Inkubasi Usaha Asisten Deputi

NO KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			Adminisrator	yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Pengembangan Teknologi Informasi dan Inkubasi Usaha
	c. Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Adminisrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembangan Teknologi Informasi dan Inkubasi Usaha
	d. Monitoring dan Evaluasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembangan Teknologi Informasi dan Inkubasi Usaha
	e. Penyusunan Perjanjian Kerjasama	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembangan Teknologi Informasi dan Inkubasi Usaha

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN / ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLOH
	WU.01.01	<p>f. Perjanjian Kerjasama</p> <p>Pengembangan Inkubasi Usaha Pengembangan, pendampingan dan pelatihan dan kewirausahaan, pengembangan lembaga inkubator lembaga pendidikan dan pelatihan, digitalisasi KUMKM, Sinergi kemitraan dan tenaga pendukung lainnya</p> <p>a. Koordinasi</p> <p>b. Pelaksanaan</p>	<p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p>	<p>Pejabat Administrator</p> <p>Pejabat Administrator</p>	<p>Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM</p> <p>Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM</p>	<p>Asisten Deputi Pengembangan Teknologi Informasi dan Inkubasi Usaha</p> <p>Asisten Deputi Pengembangan Teknologi Informasi dan Inkubasi Usaha</p>

NO KODING	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
c.	Laporan		Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembangan Teknologi Informasi dan Inkubasi Usaha
d.	Monitoring dan Evaluasi		Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembangan Teknologi Informasi dan Inkubasi Usaha
e.	Penyusunan Perjanjian Kerjasama		Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembangan Teknologi Informasi dan Inkubasi Usaha
f.	Perjanjian Kerjasama		Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian	Asisten Deputi Pengembangan Teknologi Informasi dan Inkubasi Usaha

NO KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN / ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
W.U.01.02	Pemasyarakatan Inkubasi Kewirausahaan a. Koordinasi b. Pelaksanaan c. Laporan d. Monitoring dan Evaluasi	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Terbatas	Pejabat Administrator Pejabat Administrator Pejabat Pimpinan Tinggi	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Asisten Deputi Pengembangan Teknologi Informasi dan Inkubasi Usaha Asisten Deputi Pengembangan Teknologi Informasi dan Inkubasi Usaha Asisten Deputi Pengembangan Teknologi

NO KLASIFIKASI	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
3	WU.02 WU.02.00	<p>Pengembangan Ekosistem Bisnis</p> <p>Peningkatan Peran Usaha, Industri dan pendidikan</p> <p>Pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan,</p> <p>Pengembangan, pendampingan dan pelatihan</p> <p>kewirausahaan, sinkronisasi regulasi/ peraturan/ kebijakan, sinergi kemitraan dan tenaga pendukung lainnya</p> <p>a. Koordinasi</p>	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu	Asisten Deputi Pengembangan Ekosistem
		c. Penyusunan Perjanjian Kerjasama	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembangan Teknologi Informasi dan Inkubasi Usaha
		f. Perjanjian Kerjasama	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembangan Teknologi Informasi dan Inkubasi Usaha

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN / ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		b. Pelaksanaan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembangan Ekosistem Bisnis
		c. Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembangan Ekosistem Bisnis
		d. Monitoring dan Evaluasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembangan Ekosistem Bisnis
		e. Penyusunan Perjanjian Kerjasama	Terbatas	Pejabat	Memiliki dampak	Asisten Deputi

NO KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
WU.02.01	Peningkatan Peran Pemerintah Pengembangan, pendampingan dan pelatihan kewirausahaan serta pengembangan kapasitas SDM, pengelolaan dan pemberdayaan PLUT KUMKM, sistem pemantauan dan pelaporan, sinkronisasi regulasi/ peraturan/kebijakan, sinergi kemitraan, dan tenaga pendukung lainnya a. Koordinasi b. Pelaksanaan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembangan Ekosistem Bisnis Asisten Deputi

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN / ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		c. Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat menggangu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembangan Ekosistem Bisnis
		d. Monitoring dan Evaluasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat menggangu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembangan Ekosistem Bisnis
		e. Penyusunan Perjanjian Kerjasama	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat menggangu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pengembangan Ekosistem Bisnis

NO KLASIFIKASI	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
4	WU.03 WU.03.00	f. Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Wirausaha Perluasan Akses Pembiayaan Alternatif, Bantuan pemerintah, peningkatan akses pembiayaan dan kapasitas wirausaha, pembiayaan alternatif, literasi keuangan, digitalisasi keuangan dan tenaga pendukung lainnya a. Koordinasi b. Pelaksanaan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pembiayaan Wirausaha Asisten Deputi Pembiayaan Wirausaha

NO KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN / ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
c.	Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pembayaan W/rausaha
d.	Monitoring dan Evaluasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pembayaan W/rausaha
e.	Penyusunan Perjanjian Kerjasama	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pembayaan W/rausaha
f.	Perjanjian Kerjasama	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pembayaan W/rausaha

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	WU.03.01	Permodalan Wirausaha Bantuan pemerintah, peningkatan akses permodalan dan kapasitas wirausaha, akses pembiayaan alternatif, literasi keuangan, digitalisasi keuangan dan tenaga pendukung lainnya a. Koordinasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pembiayaan Wirausaha
		b. Pelaksanaan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pembiayaan Wirausaha
		c. Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pembiayaan Wirausaha
		d. Monitoring dan Evaluasi	Terbatas	Pejabat	Memiliki dampak	Asisten Deputi

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN / ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
5	WU.04 WU.04.00	<p>Pemetaan Data, Analisis dan Pengkajian Usaha Pemetaan Data</p> <p>Pengembangan, pendampingan dan pelatihan dan kewirausahaan, pemetaan dan pendataan KUMKM, tenaga pendukung lainnya</p> <p>a. Koordinasi</p>	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat	Asisten Deputi Pemetaan dan
		f. Perjanjian Kerjasama	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUMKM	Asisten Deputi Pembiayaan Wirausaha
		e. Penyusunan Perjanjian Kerjasama	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUMKM	Asisten Deputi Pembiayaan Wirausaha
		Pimpinan Tinggi Pratama		Pimpinan Tinggi Pratama	yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUMKM	Pembiayaan Wirausaha

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		b. Pelaksanaan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pemetaan dan Data, Analisis Pengkajian Usaha
		c. Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pemetaan dan Data, Analisis Pengkajian Usaha
		d. Monitoring dan Evaluasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pemetaan dan Data, Analisis Pengkajian Usaha
		e. Penyusunan Perjanjian Kerjasama	Terbatas	Pejabat	Memiliki dampak	Asisten Deputi

NO KLASIFIKASI	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		c. Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	tugas dan fungsi Kementerian KUKM Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pemetaan dan Data, Analisis Pengkajian Usaha
		d. Monitoring dan Evaluasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pemetaan dan Data, Analisis Pengkajian Usaha
		e. Penyusunan Perjanjian Kerjasama	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pemetaan dan Data, Analisis Pengkajian Usaha
		f. Perjanjian Kerjasama	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Asisten Deputi Pemetaan dan Data, Analisis

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN / ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLOH
	WU.04.02	Data Makro Ekonomi Bidang KUMKM Data makro ekonomi KUMKM, pengembangan, tenaga pendampingan dan pelatihan kewirausahaan, dan pendukung lainnya a. Koordinasi	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUMKM	Asisten Deputi Pemetaan dan Data, Analis Pengkajian Usaha
		b. Pelaksanaan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUMKM	Asisten Deputi Pemetaan dan Data, Analis Pengkajian Usaha
		c. Laporan	Biasa/Terbuka	Pejabat Administrator	Tidak memiliki yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian	Asisten Deputi Pemetaan dan Data, Analis Pengkajian Usaha

NO KLASIFIKASI	KODE KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		d. Monitoring dan Evaluasi	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pemetaan dan Data, Analisis Pengkajian Usaha
		e. Penyusunan Perjanjian Kerjasama	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pemetaan dan Data, Analisis Pengkajian Usaha
		f. Perjanjian Kerjasama	Terbatas	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asisten Deputi Pemetaan dan Data, Analisis Pengkajian Usaha

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,

td
TETEN MASDUKI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP
DINAMIS DILINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Tabel Pengamanan Penyimpanan Arsip Dinamis Sesuai Dengan Tingkat Klasifikasi Keamanan

NO	TINGKAT KLASIFIKASI KEAMANAN	ARSIP KONVENSIONAL			MEDIA ARSIP		
		Arsip	Pengguna	Prasarana & Sarana	Arsip	Pengguna	Prasarana & Sarana
1.	Biasa/ Terbuka	Tidak ada persyaratan	Pengguna yang berasal dari	Tidak memerlukan	Back-up secara teratur untuk tujuan pemulihan	Pengguna yang berasal dari	Tidak memerlukan prasarana dan

NO KLASIFIKASI KEAMANAN	TINGKAT	ARSIP KONVENSIONAL			MEDIA ARSIP		
		Arsip	Pengguna	Prasarana & Sarana	Arsip	Pengguna	Prasarana & Sarana
		Prosedur khusus.	eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Prasarana dan sarana khusus	sistem dalam rangka menjamin autentisitas arsip	eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Prasarana & Sarana khusus
2.	Terbatas	Ada persyaratan dan prosedur dengan memberikan cap "TERBATAS" pada fisik arsip	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Diperlukan tempat penyimpanan yang aman	1. <i>Back-up</i> secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin autentisitas arsip 2. File-file elektronik (termasuk <i>database</i>) harus dilindungi terhadap penggunaan internal atau oleh pihak-pihak eksternal	1. Autentikasi pengguna (nama pengguna/ <i>password</i> atau ID digital) 2. Penggunaan untuk <i>log in</i> pada tingkat individual	1. Autentikasi server 2. Langkah-langkah keamanan dengan <i>Operating System</i> khusus atau aplikasi khusus 3. Firewall dan sistem-sistem serta prosedur-prosedur deteksi terhadap intrusi
3.	Rahasia	1. Ada persyaratan dan prosedur rahasia dengan memberikan cap "RAHASIA" pada fisik arsip 2. Tidak sembarangan	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Lokasi aman dengan akses yang terbatas	1. <i>Back-up</i> secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin autentisitas arsip 2. File-file elektronik (termasuk <i>database</i>)	3. Hanya staf yang ditunjuk oleh Kementerian atau organisasi dan tingkat di atasnya yang dapat mengakses arsip tersebut	4. Langkah-langkah keamanan dengan <i>Operating System</i> khusus atau aplikasi khusus 5. Firewall serta sistem-sistem dan

NO	TINGKAT KLASIFIKASI KEAMANAN	ARSIP KONVENSIONAL			MEDIA ARSIP		
		Arsip	Pengguna	Prasarana & Sarana	Arsip	Pengguna	Prasarana & Sarana
		meletakkan arsip / dokumen yang bersifat rahasia			harus dilindungi terhadap penggunaan internal atau oleh pihak-pihak eksternal	4. Autentikasi pengguna (nama pengguna / <i>password</i> atau ID digital) 5. Penggunaan untuk <i>log in</i> pada tingkat individual	prosedur- prosedur deteksi terhadap intrusi. Firewall adalah sistem untuk melindungi komputer atau jaringan dari akses komputer lain yang tidak memiliki hak untuk mengakses komputer atau jaringan kita

Tabel Pengamanan Penyampaian Informasi Arsip Dinamis Dengan Tingkat Klasifikasi Keamanan

NO.	TINGKAT/DRAJAT KLASIFIKASI	ARSIP KONVENSIONAL	ARSIP ELEKTRONIK
-----	-------------------------------	--------------------	------------------

1.	Biasa/Terbuka	Tidak ada persyaratan prosedur khusus.	Tidak ada prosedur khusus.
2.	Terbatas	Amplop segel.	Apabila pesan elektronik atau email berisi data tentang informasi personal, harus menggunakan enkripsi, email yang dikirim dengan alamat khusus, password, dan lain-lain.
3.	Rahasia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan warna kertas yang berbeda 2. Diberi kode rahasia 3. Menggunakan amplop dobel 4. Amplop segel, stempel rahasia. 5. Konfirmasi tanda terima. 6. Harus dikirim melalui orang yang sudah diberi wewenang dan tanggung jawab terhadap pengendalian arsip/ dokumen rahasia. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Harus ada konfirmasi dari penerima pesan elektronik atau email. 2. Menggunakan perangkat yang dikhususkan bagi pesan elektronik atau email rahasia. 3. Menggunakan persandian atau kriptografi

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,

tttd

TETEN MASDUKI